

Dana PIK Fokus Drainase Jalan Lingkungan

SEKUPANG (BP) - Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan memfokuskan program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) pada pembangunan atau rehabilitasi jalan lingkungan dan drainase.

"Permintaan banyak, tapi saya ambil yang terbanyak. Yang terbesar itu jalan setapak, drainase. Maka Perwako (peraturan wali kota) saya buat dua itu. Kalau mau ditambah silakan, misal jadi lima item, tapi yang terbesar saja. Kalau semua masuk, pusing nanti.

Nanti posyandu, poskamling, gedung serbaguna mau masuk juga," kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi, saat meninjau pelaksanaan PM-PIK tahun anggaran 2017 di Kecamatan Sekupang, Senin (9/4).

Melalui program PM-PIK ini, Rudi menargetkan jalan lingkungan bisa selesai di akhir masa jabatannya. Supaya pembangunan merata, tak hanya di jalan-jalan utama.

DLH Jangan Lepas Tangan

Terkait Maraknya Tambang Pasir Liar

BATAM KOTA (BP) - Legislatur di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

Batam minta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam tidak lepas tangan terhadap

maraknya aktivitas penambangan pasir ilegal. DLH seharusnya paling berperan meng-

Dana PIK Fokus Drainase Jalan...

Sambungan dari hal 9

"Kebijakan saya harus di atas Rp 1 miliar dana PIK ini. Karena dari 2011 saya masih Wakil Wali Kota, keluhan bapak ibu itu-itu saja, masalah jalan berlubang, parit banjir. Maka jatah bapak ibu tidak saya kurangi," jelasnya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan masyarakat melalui kelompok kerja. Sedangkan dinas, kecamatan, dan kelurahan hanya pendampingan, mengawasi, dan membantu dalam hal pelaporan karena dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pekerjaan di lingkungan ini, kata Rudi, tidak lagi dilaksanakan dinas di Pemko Batam karena volume kerja mereka

sudah cukup besar. Selain itu, dengan PM-PIK, masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan. "Saya haruskan yang mengerjakan masyarakat. Karena ini akan membantu ekonomi bapak ibu," kata mantan anggota DPRD ini.

Rudi berharap untuk PM-PIK 2018 mulai dikerjakan pada Juli mendatang, agar pelaksanaannya selesai tepat waktu. Besaran anggarannya yang disiapkan tahun ini mencapai Rp 1,1 miliar per kelurahan.

"Dulu dipikir susah Rp 1,1 miliar. Ternyata bisa juga. Tahun depan kita paksakan Rp 1,3 miliar. Terkadang dipaksa itu perlu juga, tapi harus tepat," kata dia lagi.

Dalam kegiatan ini, Rudi menyambangi kelurahan yang

ada di Sekupang. Selain Tiban Lama, Rudi juga bertemu warga di Mutiara View, Kelurahan Tiban Baru, Kelurahan Tanjungriau, Patam Lestari, Seiharapan, dan Tiban Indah.

Adapun jumlah kegiatan PIK di Sekupang pada tahun anggaran 2017 sebanyak 67 proyek. Terbagi di Kelurahan Tiban Indah tujuh kegiatan, Tiban Lama 14 kegiatan, Patam Lestari sembilan kegiatan, Seiharapan 15 kegiatan, Tiban Baru enam kegiatan, Tanjungriau 13 kegiatan, dan Tanjungpinggir tiga kegiatan.

Bentuk kegiatannya antara lain pembangunan atau rehabilitasi jalan, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, dan tem-

entikan semua aktivitas penambangan pasir ilegal di Batam.

"DLH yang harus berperan, karena dampak yang ditimbulkan (penambangan pasir ilegal), masyarakat yang merasakan. Seperti menimbulkan banjir maupun kecelakaan di bekas galian pasir," kata Ketua DPRD Batam Nuryanto di ruang kerjanya, Senin (9/4).

Cak Nur, panggilan akrab Nuryanto mengungkapkan penambangan pasir jelas-jelas merusak lingkungan dan melanggar undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. "Kita jalan berdasarkan aturan saja. Kalau itu ilegal ya hentikan," tegasnya.

Menurutnya, dampak negatif dari penambangan pasir liar tersebut sangat besar, maka DLH dituntut membantu dalam pengawasan dan penertiban. Sebab, tambang pasir tidak memiliki izin atau ilegal, wajib ditertibkan. DLH juga harus merekomendasikan ke provinsi.

"Saya pikir karena ini menyangkut teritorial Batam, apalagi itu ilegal, ya DLH berhak mengambil langkah tegas," tuturnya.

Berbeda jika ada penambangan yang mengantongi izin lalu izin disalahgunakan, maka memang kewajiban DLH provinsi menertibkan, karena izin dikeluarkan Pemprov Kepri.

"Yang di Batam ini ilegal semua. Yang dirusak ya wilayah Batam. Maka tak ada alasan DLH Batam melempar tang-

gung jawab ke yang lain," tegasnya. "Izin memang di sana (Pemerintah Provinsi), tapi pengawasan tetap melekat di kita (Pemko Batam)," tegas Cak Nur, lagi.

Menurutnya, DLH bisa menggandeng pihak lain untuk melakukan pengawasan. Termasuk pihak BP Batam yang memang sebagai pemilik lahan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Jefri Simanjuntak juga meminta Pemko dan BP Batam harus bisa tegas. Belasan tahun tambang pasir beroperasi tetapi belum ada yang diseret ke pengadilan. "Saya tantang Pemko Batam berani tidak menindak itu (penambangan pasir liar). Padahal jelas itu sangat merusak lingkungan," katanya.

Menurut Jefri, meski perizinan tambang ada di provinsi,

tetapi masalah sosial yang timbul di atas lahan tersebut adalah tanggung jawab Pemko Batam. Dampak yang ditimbulkan langsung dirasakan masyarakat. "Dampak dari penambangan pasir ilegal ini sudah sangat luar biasa. Aneh kalau selama ini Pemko dan BP Batam tidak tahu mengenai hal ini," ujarnya.

Pantauan *Batam Pos*, sejumlah pekerja terlihat sibuk mengangkat pasir dari lokasi tambang ke dalam truk yang parkir berjejer di pinggir lokasi tambang.

Proses pengerukan pasir menggunakan mesin penyedot, namun aktivitas menaikkan pasir ke dalam truk dilakukan secara manual. Di sekitar lokasi tambang juga bising dengan suara mesin penyedot pasir. (rng/ian/eja)

Jatah Premium SPBU Dibatasi

Sambungan dari hal 9

hari," terang Dadang ditemui di kantornya, kemarin.

Disinggung apa yang menjadi alasan keterlambatan pengiriman premium, Dadang sendiri tak bisa menjelaskan. Namun, kemungkinan keterlambatan

mendapat jatah 8-16 kiloliter (kl) setiap harinya. Pada Senin, Rabu, dan Kamis, pihaknya hanya mendapat 8 kl pada sore hari. Namun pada Selasa, Jumat, dan Sabtu, jatah premium bisa didapat 16 kl.

"Padahal kuota kebutuhan premium sampai 24 kl dan kami memiliki tanki yang

Batam Center. Sebab, rata-rata konsumen mereka lebih memilih pertalite. Apalagi melihat konsumsi pertalite per harinya bisa sampai 24 kl.

"Mungkin karena wilayah Batam Center, jadi pengendara lebih memilih pertalite. Intinya, jangan sampai pertalite

SPBU. "Kalau memang mau dihilangkan, ya lebih baik dihilangkan. Daripada kosong begini, seolah-olah dari kami yang salah," ucapnya.

Sementara itu, pihak Pertamina belum bisa dikonfirmasi terkait pembatasan maupun keterlambatan pengiriman premium ke sejumlah

Limbah Laut Ancam Pariwisata Batam

Kejadian Berulang Setiap Tahun

BATAM KOTA (BP) - Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, limbah minyak hitam yang mencemari laut Kepri, khususnya Batam dibuang dengan sengaja. Jika dibiarkan terus menerus, hal ini dapat melemahkan sektor pariwisata di Kepri, khususnya Batam dan Bintan.

"Ini sering terjadi, jangan-jangan ini sengaja atau modus

untuk menjatuhkan pariwisata kita," kata Nuryanto, Senin (9/4) siang.

Ia menilai, kejadian yang berulang-ulang setiap tahun ini akan berdampak buruk bagi Batam. Maka itu, ia berharap pemerintah daerah baik Pemko Batam maupun Pemerintah Provinsi Kepri dengan bantuan pemerintah pusat, dapat mengatasi hal ini. "Koordinasi ini penting, minimal tahun depan tak ada lagi pencemaran seperti ini," ucap dia.

Harapan ini disampaikan karena pada Maret lalu wilayah pantai, khususnya Nongsa Village dan Turi Beach Resort tercemar limbah minyak hitam. Menurut politikus PDIP itu, jika pantai Batam tidak bersih dan tercemar limbah minyak tentu akan berdampak pada kunjungan wisatawan.

"Pantai beroli semua, apa yang mau dinikmati. Wisatawan lokal tak mau, apalagi wisatawan asing," imbuhnya.

Sementara itu, ia sepakat dengan

rencana agar penanganan limbah laut dapat dikoordinasikan dengan negara-negara tetangga Indonesia. Khususnya Singapura dan Malaysia. "Saya pikir perlu dan penting. Kesempatan dan pengaruh serta kekuatan kita harus dimanfaatkan," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berharap Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman membicarakan penanganan dan pencegahan

kasus limbah laut dengan melibatkan Singapura dan Malaysia. Bukan tanpa alasan, harapan ini disampaikan karena setiap tahun laut Kepri kerap dicemari limbah minyak hitam.

"Kami harap memang dibiarkan tingkat internasional, antartiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Mungkin nanti melalui Kementerian Luar Negeri," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie, Minggu (8/4). (adi)

Dewan Belum Setuju Pajak Ditunda

BATAM KOTA (BP) - Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah memungkinkan untuk ditunda. Namun, harus ada kajian yang mendalam agar tidak berdampak pada perencanaan pendapatan daerah Kota Batam.

"Makanya ketika ada permintaan penundaan dari pengusaha hiburan. Saya mendisposisikan untuk ditindaklanjuti Komisi II.

Apa hasilnya itu yang akan kita rekomendasikan kepada Pemerintah Kota Batam," kata Nuryanto, Senin (9/4).

Diakuinya, karena aturan tersebut sudah dalam bentuk Perda, tentu tidak mudah direvisi. Selain butuh waktu panjang, sebab butuh kajian dari sisi situasi ekonomi Batam, yang dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap usaha hiburan.



F. RENGGA/BATAM POS
Nuryanto

erbu pengendara, baik roda dua maupun roda empat.

Manajer Operasional SPBU Simpang Regata, Batam Cen-

SISWA-siswi SMA Negeri 3 Batam tampak serius mengerjakan soal-soal mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui layar komputer, Senin (9/4).



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

Punya Komputer, Listrik Tak Ada

SMKN 11 Pulau Buluh Numpang UNBK di SMKN 5

SAGULUNG (BP) - Siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Batam di Pulau Buluh terpaksa ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan me-

numpang di gedung milik SMKN 5 Batam di Dapur 12, Sagulung. Padahal, sekolah tersebut sudah dilengkapi

Dewan Belum Setuju Pajak Ditunda

Sambungan dari hal 9

"Misal dalam Perda 35 persen. Kira-kira bisa *gak* jangan segitu dulu. Kalau ekonomi bagus baru dijalankan. Jadi ini yang harus dikaji dulu," paparnya.

Di sisi lain, dia melihat pengusaha hiburan tidak bisa serta merta datang ke DPRD meminta agar perda tersebut ditunda. Apalagi melihat perda yang sudah disahkan dibiayai dari APBD Batam. Sehingga untuk menjalankannya perlu pertanggungjawaban dari lembaga eksekutif dan legislatif.

"Kalau saya yang penting masyarakat senang dan bisa berjalan. Tapi ingat, harus ada

kajian," tegas Nuryanto lagi.

Ketua Komisi II DPRD Batam Edward Brando mengatakan, revisi perda tidak akan mudah dan memakan waktu lama, karena harus melalui tahapan harmonisasi perda. Selain itu, ia juga belum bisa mengambil keputusan penundaan. Sebab, belum ada dasar dari Pemko Batam terkait rencana penundaan perda tersebut.

"Segala sesuatu keputusan harus didasari sesuatu yang kuat. Persoalan naik turun itu hanya keputusan akhir," kata Edward saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pariwisata Kota Batam dan Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, kemarin.

Menurut Edward, harus ada data valid terkait penundaan pajak hiburan. Sehingga DPRD Batam sebagai lembaga legislatif bisa mempertanggungjawabkan. "Kenapa harus ditunda, dibatalkan naik harus ada data, dasarnya apa. Saya pikir hal ini tidak bisa dipaksakan untuk ditunda," terang dia.

Senada, anggota Komisi II DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging juga melihat Pemko Batam harus menjalankan perda tersebut. Selain itu, kata dia, Peraturan Wali Kota (Perwako) terkait Perda Pajak

hanya sebagai diskresi agar mengubah struktur APBD. "Gelper tutup itu bukan acuan. Harus ada dasar yang jelas untuk jadi acuan," tegasnya.

Menurut Uba, terlalu berisiko untuk melakukan penundaan. "Yang jelas bila dilakukan penundaan minimal setahun. Tapi bagaimana dengan struktur APBD kita yang telah direncanakan. Tentu akan ada sejumlah program pemerintah yang tertunda," tegasnya.

"Makanya pertemuan tadi (kemarin) tak ada keputusan. Kita ingin Pemko memberikan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan," sambungnya. (rng)

Kios Liar Rugikan Pertokoan

Tak Bayar Pajak ke Pemda

ALFIAN LUMBAN GAOL, Batuaji

PEMBANGUNAN kios liar di sekitar pasar seken Aviari terus berlanjut. Padahal pengembangan kios liar ini melanggar dan merugikan pengembang properti resmi seperti rumah toko (ruko) maupun pertokoan lainnya.

"Kami yang punya properti pertokoan sangat dirugikan.

Kita jelas-jelas membayar pajak, mereka tidak. Mereka dibebaskan oleh pemerintah," kata Werton Panggabeh, pengusaha sekaligus anggota Komisi III DPRD Batam, Senin (9/4).

Ia mengatakan, dibiarkannya kios liar di kawasan tersebut semakin memancing oknum lainnya untuk membangun kios liar di titik yang baru. Menurutnya, pemerintah harus

memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

"Kemarin sudah disampaikan pembangunan kios liar yang baru tidak boleh lagi. Tapi buktinya, itu tak kunjung ditertibkan," katanya.

Politikus Gerindra tersebut menambahkan, pihak kecamatan dan Satpol PP harus bertindak tegas. Apalagi, kontribusi dari kios liar tersebut tidak ada sama sekali untuk Kota Batam.

"Itu disewakan mahal. Pada-

hal hanya kios liar. Sementara pertokoan tidak laku. Orang pasti memilih kios liar karena memang lebih murah daripada ruko. Tapi ingat, kios liar tak ada kontribusinya. Bahkan merusak ruang terbuka hijau," katanya.

Sementara itu, Camat Batuaji Ridwan tetap meminta pengelola untuk menghentikan pembangunan kios liar tersebut. Ia juga meminta agar Satpol PP menertibkan kios liar tersebut.

"Sudah berkali-kali saya katakan, tidak diizinkan bangun kios liar di sana," katanya.

Beberapa waktu lalu, Kabid Ketenteraman dan Keteriban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Batam Imam Tohari menegaskan, surat dari kecamatan yang meminta penertiban kios liar tersebut belum sampai ke Satpol PP.

"Mana suratnya, belum pernah saya terima. Saya juga kurang tahu masalah kios liar itu," katanya.***

PELAYANAN



Konter Imigrasi Ditambah

BATAM KOTA (BP) - Mengurangi antrean yang terlalu panjang, manajemen Pelabuhan Feri Internasional Batam Center dan Imigrasi sepakat menambah jumlah konter pengecepan paspor dalam waktu dekat ini.

"Jumlah penumpang yang melalui pelabuhan ini cenderung membludak, makanya kita tambah konter Imigrasi agar pelayanan jadi cepat," ujar Nika Astaga, General Manager Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, kemarin.

Nika Astaga mengatakan ada dua konter yang akan ditambah sebelum memasuki bulan Ramadan. Satu terletak di area keberangkatan dan satu di pintu kedatangan.

"Sekarang ada delapan konter. (Penambahan konter) mudah-mudahan bisa mengatasi lonjakan penumpang, apalagi saat *peak season* (musim ramai)," kata Nika.

Selain konter Imigrasi, pihaknya juga memiliki dua pintu *autogate* dan *smartcard* di area kedatangan dan keberangkatan. Pintu otomatis ini membuat pelabuhan ini lebih istimewa dibanding pelabuhan lainnya di Batam. Bahkan dengan daerah lain di Indonesia.

"*Autogate* ini hanya ada di Bali, Bandara Soekarno-Hatta, dan Batam," ujar Nika.

Menurutnya, Pelabuhan Feri Internasional Batam Center jadi pelabuhan percontohan. Sebab, selalu bisa mengatasi jumlah penumpang meski dalam kondisi yang membludak.

"Hari biasa saja jumlah penumpang bisa sampai 5.000, kalau *peak season* kemarin sampai 18 ribu penumpang," papar Nika.

Bahkan belum lama ini, pihaknya mendapat kunjungan dari DPD RI yang ingin melihat pelayanan di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Apalagi adanya, informasi tentang antrean panjang saat *peak season*.

"Mereka memuji dengan pelayanan di sini," kata Nika.

Beberapa waktu lalu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Lucky Agung Binarto mengatakan telah meminta penambahan konter Imigrasi untuk cap paspor. Hal itu dikarenakan jumlah penumpang yang sering membludak di pelabuhan tersebut, apalagi saat akhir pekan dan musim liburan. (she)